

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS RASIO PEMERINTAH KOTA MEDAN

Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si

Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstract

Medan City is a metropolitan Municipal Government where its territory has an increasing number of people every year to confuse the local government in the development of the area. On the other hand the allocation of available development funds is relatively limited so the government should be able to facilitate the needs of the community for sustainable development. So the Government should be able to grow new investment in Medan City through allocation of revenue fund such as income, debt and expenditure so as to increase economic growth. This research uses LKPD data of Medan and Medan in figures from 2006 to 2015, then data is processed using SPSS method. The results of this data analysis can prove that partially Debt Ratio to GDP, Debt Ratio to Local Revenue, Debt Servica Ratio, Debt Ratio to Local Revenue, Growth Analysis of Spending no effect and significant to economic growth (GDP in constant price). While the Ratio of Efficiency Expenditure, Ratio of Regional Expenditure to PDRB partially influence to economic growth (GDP in constant price). Then Simultaneous Debt Ratio to GRDP, Debt Ratio to Local Revenue, Debt Servica Ratio, Ratio of Debt to Local Revenue, Expense Growth Analysis, Expense Efficiency Ratio, Ratio of Regional Expenditure to GRDP affect economic growth (GDP in constant price). With the influence of 98.50% Debt to GDP ratio, Debt Ratio to Local Revenue, Debt Servica Ratio, Revenue Ratio to Local Revenue, Growth Analysis of Expenditure, Expense Efficiency Ratio, Local Expenditure Ratio to GRDP in constant price while the remaining 0.50 % is explained by other factors such as regional financial dependency ratio, debt growth analysis, revenue and expense realization analysis and other financial performance ratios. With the management of optimal regional financial performance such as effectiveness in the use of expenditure and income efficiency can increase economic growth (PDRB in constant price) in Medan City.

Keywords: Debt, Revenue, Expenditure and GDP Price Constant

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan berfokus pada sektor strategis dan potensial pada wilayah baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mewujudkan melalui PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PerMendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penggunaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Menurut Marijana Badun (2009) mengatakan sistem keuangan memacu pertumbuhan ekonomi dan hal terpenting untuk mengetahui kapan dan dalam keadaan apa sektor keuangan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan apa yang menentukan efisiensi sehingga pemerintah berperan penting untuk mengetahui kapan sistem keuangan berubah lebih baik atau buruk.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya. Maka untuk itu pemerintah harus mengetahui apakah dana utang yang

digunakan Pemerintah Kota Medan sebagai belanja daerah dapat memperbaiki prasarana dan sarana seperti insfrastuktur dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan menciptakan investasi yang optimal sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sehingga diperlukan alat pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio utang terhadap PDRB, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah, *debt service ratio*, pertumbuhan belanja, efesiensi belanja dan rasio belanja daerah terhadap PDRB berpengaruh terhadap PDRB dalam harga konstan pada pemerintah Kota Medan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang akan dianalisis adalah mencakup komposisi APBD, baik penerimaan seperti pendapatan, utang dan alokasi belanja. Analisis mengenai penerimaan daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah agar dapat menjadi pemasukan daerah. Sedangkan analisis belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah melakukan alokasi sumberdaya untuk aktivitas pembangunan dan analisis utang menjelaskan kemampuan pemerintah mengolah manajemen utang secara baik dimana akan mempengaruhi kondisi stabilitas makro ekonomi dan faktor eksternal seperti kebijakan fiskal dan moneter. Manfaat utang dapat juga digunakan dalam memperbaiki struktur neraca, meningkatkan struktur fiskal, menjaga kesinambungan fiskal serta untuk membiayai investasi pembangunan yang membutuhkan dana besar sehingga akselerasi pembangunan tercapai. Berdasarkan data yang diperoleh untuk sementara adalah laporan realisasi Pemerintah Kota Medan bahwa total belanja tahun 2009 sebesar Rp.1.886.588.720.238,68, tahun 2010 sebesar Rp.2.235.195.758.724,49, tahun 2011 sebesar Rp.3.032.799.976.733,88, mengalami penurunan tahun 2012 sebesar Rp.3.021.172.391.041,67 dan meningkat kembali tahun 2013 sebesar Rp.3.224.449.048.408,88. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yaitu PDRB Harga berlaku bahwa setiap tahun mengalami peningkatan adalah ditahun 2009 sebesar Rp. 33.430.051,02, tahun 2010 sebesar 35.822.224,73, tahun 2011 sebesar Rp. 38576.234,25, tahun 2012 sebesar Rp. 105.162.000 dan tahun 2013 sebesar Rp.110.795.420. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan belanja yang semakin meningkat dapat memacu pertumbuhan ekonomi setiap tahun bertambah. Sehingga kita akan melihat sejauhmana kemampuan Pemerintah Kota Medan semenjak Otonomi Daerah dari tahun 1999 yang membuktikan bahwa daerah tersebut sudah mandiri yaitu dalam memanfaatkan pendapatan, utang dan belanja memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai aktivitas seperti perbaikan sarana dan pasarana. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah sehingga pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah. Seperti pendapat Magdalena K (2012) bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak hanya pada indikator keuangan tetapi termasuk indikator non-keuangan berfungsi untuk melihat pengukuran tindakan kinerja keuangan dan berdampak pada peningkatan kualitas. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Dan daerah tersebut terhindar dari risiko dalam pembayaran utang seperti reputasi menjadi turun, risiko ekonomi meningkat sehingga investor enggan untuk berinvestasi serta mengganggu pertumbuhan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

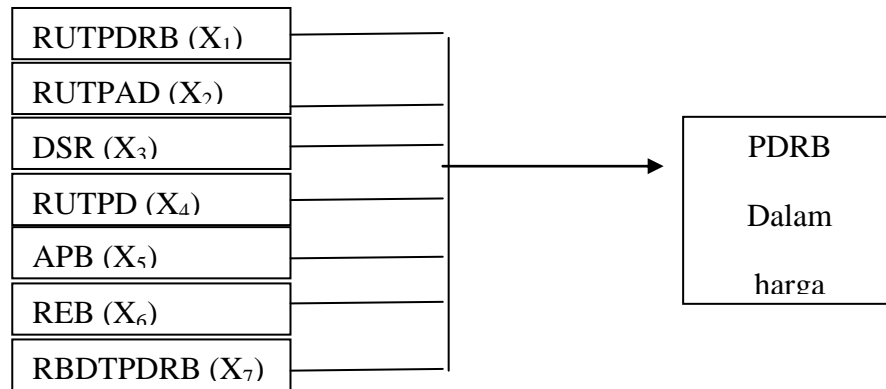
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah rasio utang terhadap PDRB, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah, *debt service ratio*, pertumbuhan belanja, efesiensi belanja dan rasio belanja daerah terhadap PDRB berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap PDRB di Pemerintah Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh rasio utang terhadap PDRB, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah, *debt service ratio*, pertumbuhan belanja, efisiensi belanja dan rasio belanja daerah terhadap PDRB berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap PDRB di Pemerintah Kota Medan.

D. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan teknologi yang semakin canggih mengharuskan pengguna stakeholders harus dapat meningkatkan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk mencapai kenaikan dari pendapatan perkapita, penyediaan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja yang pada gilirannya mampu mengurangi angka pengangguran selain itu pembangunan ekonomi juga dapat mengusahakan pemerataan pendapatan serta dapat mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antar daerah.

Pembangunan ekonomi disuatu daerah merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan berkesinambungan yang dijalankan secara bersama-sama baik itu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dilakukan sebagai langkah untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasil *outputnya* sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Jadi berdasarkan konsep perekonomian terbuka, di mana pertumbuhan ekonomi merupakan agregat dari konsumsi sektor rumah tangga, investasi sektor swasta, pengeluaran sektor pemerintah dan perdagangan luar negeri sektor ekspor-impor ($Y = C + I + G + NX$).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Ada beberapa definisi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang dikemukakan para ekonom dengan menggunakan sudut pandang yang beragam, tetapi pada dasarnya kesemuanya mempunyai pengertian yang sama. Salah satu indikator kebersihan pembangunan ekonomi adalah kenaikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. Secara konseptual pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berlangsung secara terus menerus harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pembangunan. Karena itu pembangunan ekonomi disamping mengubah struktur produksi nasional dengan cara merombak PDB kearah yang lebih baik juga harus berupaya merubah distribusi pendapatan nasional yang semakin merata.

Untuk mengetahui adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara, diperlukan suatu indikator. Sadono (2008) menyatakan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu :

- a. Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB)

- b. Produk Domestik Bruto Perkapita/Pendapatan Perkapita.
- c. Pendapatan Per Jam Kerja

B. Laporan Keuangan

Reformasi sektor publik berarti juga adanya reformasi keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah dalam pelaksanaannya akan berdampak juga terhadap reformasi anggaran (*budgeting reform*) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan dan pertanggung jawaban anggaran. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21). Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakai (Bastian, 2010).

Dalam Bastian (2010) disebutkan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan umum dalam pemerintah daerah adalah menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan, dan untuk mendemonstrasikan akuntabilitas entitas untuk sumber daya - sumber daya terpercaya dengan menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya finansial, bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya, kondisi finansial suatu entitas dan perubahan di dalamnya, berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya dan informasi agrerat yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal kas jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintahan, Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Berhubung anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam penyusunan APBD seharusnya digunakan struktur, definisi, dan basis yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporannya.

C. Jenis Laporan Keuangan

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, Neraca serta Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial (Mardiasmo, 2007), Bastian (2010) menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan Posisi Keuangan, laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan Realisasi Anggaran, laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut ini (Suyono, 2010) adalah

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f. Formasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Daftar dan skedul.

D. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu, dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan (Bastian, 2010). Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan relevan, jika memenuhi kriteria seperti manfaat umpan balik (*feedback value*) yaitu Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu, Manfaat prediktif (*predictive value*) yaitu Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, Tepat waktu yaitu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan dan Lengkap yaitu Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

E. LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

LAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaatnya yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta Dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Misalkan dalam satu kegiatan target yang akan dihasilkan adalah 100 orang yang akan terlatih, kemudian setelah kegiatan tersebut dilaksanakan berapa jumlah yang terlatih, apakah masih tetap 100 orang, kurang dari 100 orang atau mungkin lebih dari 100 orang.

F. Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu (Bastian, 2010).

Mengadakan interpretasi atau analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Dengan mengadakan analisis laporan keuangan, manajer akan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaannya, dan akan dapat

diketahui hasil-hasil keuangan yang telah dicapai di masa lalu dan masa yang sedang berjalan. Dengan mengadakan analisis keuangan dari tahun-tahun yang telah lalu dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Kemudian oleh manajemen analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi di masa depan dan, yang lebih penting, sebagai titik awal untuk perencanaan tindakan untuk masa yang akan datang.

G. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Akuntabilitas menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan penting untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat Pemerintah Daerah untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Tidak hanya itu, pengukuran kinerja juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum, 2009).

Manfaat sistem pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009), antara lain adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara Objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara Objektif.

H. Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2009) ada beberapa model rasio yang akan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

a. Rasio Utang Terhadap PDRB

Rasio ini membandingkan anatar jumlah total utang pemerintah daerah dengan PDRB setiap tahunnya. Manfaat rasio ini untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengganggu beban utang dan memenuhi kewajibannya berdasarkan kemampuan produktivitas yang dimiliki daerah. Rumus rasio ini adalah

$$\text{Rasio Utang terhadap PDRB} = \text{Total Utang} / \text{PDRB}$$

b. Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini membandingkan antara total utang dengan total PAD, rasio ini menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan PAD, jika rasio ini semakin rendah maka akan semakin baik. Rumus rasio ini adalah

$$\text{Rasio Utang terhadap PAD} = \text{Total Utang} / \text{PAD}$$

c. Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah

Rasio ini menjelaskan tentang kinerja pinjaman daerah yaitu bagaimana pemerintah daerah dapat mengembalikan pinjamannya kepada para kreditor yaitu pihak eksternal. Rumus rasio ini adalah Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah = Total Utang Pemerintah Daerah/Total Pendapatan Daerah

d. Debt Service Ratio

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah meliputi pokok dan bunganya dengan pendapatan daerah yang dimilikinya. Rumus rasio adalah

$$DSR = \text{Total pendapatan daerah} / \text{Pokok pinjaman} + \text{bunga}$$

e. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Rumus analisis pertumbuhan belanja adalah

$$\text{Pertumbuhan belanja Thn } t = (\text{Realisasi belanja thn } t - \text{realisasi belanja thn } t-1) / \text{realisasi belanja thn } t-1$$

f. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Manfaat rasio ini adalah untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rumus rasio ini adalah

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = (\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$$

g. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

Rasio ini membandingkan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Manfaat rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rumus rasio adalah

$$\text{Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB} = \text{Total realisasi Belanja Daerah} / \text{Total PDRB}$$

BAB III. METODE PENELITIAN**A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah hubungan kausal. Pendekatan dengan ruang lingkup Pemerintah Kota Medan dengan tujuan dapat diketahui kinerja keuangan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian dilakukan dengan fakta untuk membuktikan secara empiris bahwa rasio utang, pendapatan dan belanja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kota Medan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Medan dan Kantor Badan Pusat Statistik Kota Medan. Waktu penelitian direncanakan dari 1 bulan setelah pengumuman pemenang hibah kemristekdikti.

C. Sumber Data

Sumber data dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan, Medan Dalam Angka.

D. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Medan, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan dari tahun 2006 sampai dengan 2015 sehingga berjumlah 10 unit amatan analisis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumentasi berupa data sekunder meliputi PDRB dalam harga berlaku, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Medan tahun 2006 sampai dengan 2015 serta buku dan jurnal mengenai topik penelitian.

F. Metode Analisis Data

Metodologi digunakan berupa pendekatan analisis kuantitatif yang digunakan untuk melihat dampak analisis rasio pengukuran kinerja keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap PDRB dalam harga berlaku pada Pemerintah Kota Medan, dengan menggunakan pendekatan Regresi Berganda dimana variabel-variabel tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS. Berikut ini model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PDRB = \beta_0 + \beta_1 RUTPDRB + \beta_2 RUTPAD + \beta_3 DSR + \beta_4 RUTPD + \beta_5 APB + \beta_6 REB + \beta_7 RBDTPDRB + e$$

Keterangan:

PDRB (Y) : Produk Domestik Regional Bruto dalam harga konstan

β_0 : Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5,6}$ dan 7 : Koefisien Regresi $X_{1,2,3,4,5,6}$ dan 7

RUTPDRB (X_1) : Rasio Utang Terhadap PDRB

RUTPAD (X_2) : Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

DSR (X_3) : *Debt Service Ratio*

RUTPD (X_4) : Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah

APB (X_5) : Analisis Pertumbuhan Belanja

REB (X_6) : Rasio Efisiensi Belanja

RBDTPDRB (X_7) : Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB

e : error

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskripsi

Untuk melihat bagaimana perkembangan statistik deskripsi untuk masing-masing variabel penelitian maka dapat dilihat data sebagai berikut ini

Tabel 4.1. Perkembangan Rasio kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Tahun	PDRB	RUP	RUTPAD	RUPD	DSR	APB	REB	RBDPDRB
2006	27.234,45	6067217,00	0,5282	0,1181	0	0,0452	0,8178	4822362
2007	29.352,92	5687567,00	0,5343	0,1016	2915,14	0,0604	0,7945	4744666
2008	31.373.951,99	5302,39	0,4249	0,0921	3207,24	0,0612	0,8313	47107,82
2009	33.430.051,02	6156,66	0,5584	0,11	904,22	0,2765	0,8029	56433,92
2010	35.822.224,73	3959,31	0,2408	0,6085	856,82	0,1848	0,8657	62396,9
2011	38.576.234,25	3876,77	0,1503	0,0544	1349,03	0,3605	0,8955	78831,9
2012	105.162.000	411,26	0,3774	0,1445	900,87	-0,01	0,7381	2864316
2013	110.795.420	2969014,00	0,2727	0,1004	658,71	0,0705	0,7609	2910273
2014	117.528.080	1688267,00	0,1433	0,0491	2851,6	0,1545	0,8048	3167309
2015	124.277.480	189451,00	0,1581	0,5553	41697,67	0,175	0,8001	3519333

Sumber : Data Diolah , 2017

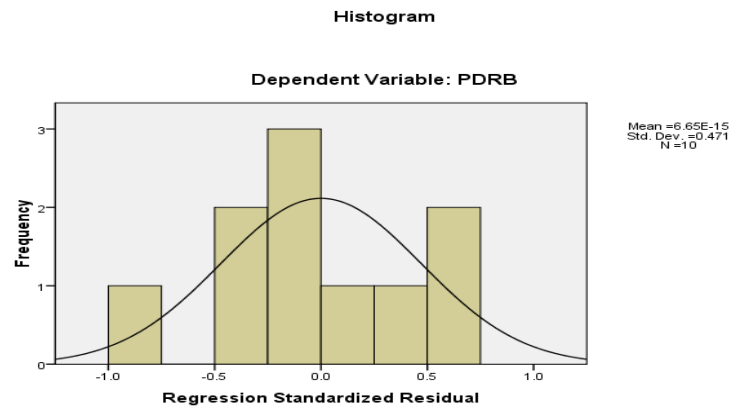
Berdasarkan data diatas bahwa PDRB Kota Medan nilai terendah di tahun 2006 sebesar 27.234,45 Milyar dan tertinggi di tahun 2015 sebesar 124.277.480 milyar. RUP (Rasio Utang terhadap PDRB dalam harga konstan) nilai terendah di tahun 2012 sebesar 411,26 dan tertinggi ditahun 2007 sebesar 5.687.567. RUTPAD (Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah) nilai terendah ditahun 2014 sebesar 0,1433 dan nilai tertinggi ditahun 2009 sebesar 0,5584. RUPD (Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah) nilai terendah ditahun 2011 sebesar 0,0544 dan nilai tertinggi ditahun 2010 sebesar 0,6085. DSR (*Debt Service Ratio*) nilai terendah di tahun 2006 sebesar 0 dan nilai tertinggi ditahun 2015 sebesar 41.697,67. APB (Analisis Pertumbuhan Belanja) nilai terendah ditahun 2011 sebesar -0,01 dan nilai tertinggi ditahun 2011 sebesar 0,3605. REB (Rasio Efisiensi Belanja) nilai terendah ditahun 2012 sebesar 0,7381 dan nilai tertinggi ditahun 2012 sebesar 0,8955. RBDTPDRB (Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB) nilai terendah ditahun 2008 sebesar 47107,82 dan nilai tertinggi ditahun 2007 sebesar 4.744.666.

2. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Normalitas

Dilihat dari grafik histogram menunjukkan data distribusi nilai residual telah berdistribusi normal. Demikian juga pada norma probability plot, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Begitu pula dengan uji normalitas residual dari uji statistik non-

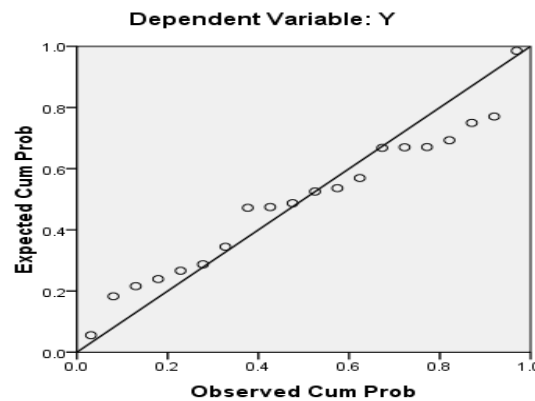
parametrik Kolmogorov-Smirnof (*1-sampel K-Stest*) menunjukkan bahwa model regresi sudah memenuhi syarat uji asumsi normalitas data.



Sumber: data diolah, 2017

Gambar 4.1 Histogram

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: data diolah, 2017

Gambar 4.2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dari hasil uji statistik diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov dengan $\alpha = 0.05$ asymp.Sig = 1.000 > 0.05 sehingga menunjukkan data residual berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.2. One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.03014563E6
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.102
	Negative	-.112
Kolmogorov-Smirnov Z		.354
Asymp. Sig. (2-tailed)		1.000
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: data diolah, 2017

b. Uji Multicollinierity

Tabel 4.3 Collinarity Statistics

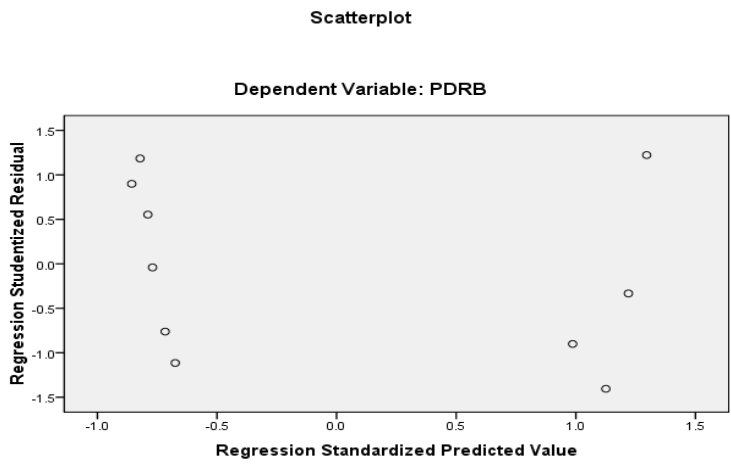
Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-9.352E7	2.809E7			
	RUP	-.156	1.050	-.021	.081	12.294
	RUTPAD	2.521E7	6.852E6	.234	.404	2.474
	RUPD	4.747E6	4.938E6	.055	.508	1.970
	DSR	-53.961	107.528	-.038	.282	3.545
	APB	1.332E7	1.077E7	.085	.345	2.897
	REB	1.368E8	3.288E7	.348	.234	4.280
	RBDPDRB	-6.394	1.441	-.703	.065	15.341

a. Dependent Variable: PDRB
 Sumber: data diolah, 2017

Uji multikolinieritas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen pada model. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil uji statistik nilai *Tolerance* menunjukkan ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0.10, dan demikian juga hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) menunjukkan nilai VIF lebih besar dari 10 yaitu variabel RUP, dan RBDPDRB ini disebabkan karena satuan variabel berbeda ada yang ribuan dan desimal serta kurangnya data sampel penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Grafik scatterplots menunjukkan titik-titik sudah menyebar secara acak dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur, yang mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: data diolah, 2017

Gambar 4.3. Scatterplot

d. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel dibawah menunjukkan nilai Durbin Waston sebesar 2.071, nilai ini berada diantara -2 sampai +2 sehingga hal ini mengindikasikan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel .4.4 Uji Durbin Waston

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.998 ^a	.997	.985	2.18527E6	.997	87.103	7	2	.011	2.071

a. Predictors: (Constant), RBDPDRB, RUPD, RUTPAD, REB, DSR, APB, RUP

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: data diolah, 2017

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Simultan

Tabel 4.5. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.912E15	7	4.160E14	87.103	.011 ^a
	Residual	9.551E12	2	4.775E12		
	Total	2.921E15	9			

a. Predictors: (Constant), RBDPDRB, RUPD, RUTPAD, REB, DSR, APB, RUP

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: data diolah, 2017

Dari hasil uji Anova diperoleh F-hitung sebesar 87,103, dengan tingkat probabilitas 0.01. Dengan demikian disimpulkan, $p = 0.000 < \alpha = 0.05$, bahwa Rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Servica Ratio*, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan).

b. Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap pusat pertumbuhan ekonomi (PDRB) . Diperoleh hasil uji coefficient bahwa Rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Servica Ratio*, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan). Sedangkan Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan).

Tabel 4.6. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-93.520.000.000	2.809E7		-3.329	.080
	RUP	-.156	1.050	-.021	-.149	.895
	RUTPAD	25.210.000.000	6.852E6	.234	3.679	.067
	RUPD	4.747.000.000	4.938E6	.055	.961	.438
	DSR	-53.961	107.528	-.038	-.502	.666
	APB	13,320.000.000	1.077E7	.085	1.237	.342
	REB	136.800.000.000	3.288E7	.348	4.162	.053
	RBDPDRB	-6.394	1.441	-.703	-4.436	.047

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-93.520.000.000	2.809E7		-3.329	.080
	RUP	-.156	1.050	-.021	-.149	.895
	RUTPAD	25.210.000.000	6.852E6	.234	3.679	.067
	RUPD	4.747.000.000	4.938E6	.055	.961	.438
	DSR	-53.961	107.528	-.038	-.502	.666
	APB	13.320.000.000	1.077E7	.085	1.237	.342
	REB	136.800.000.000	3.288E7	.348	4.162	.053
	RBDPDRB	-6.394	1.441	-.703	-4.436	.047

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: data diolah, 2017

Berdasarkan data tabel diatas diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut;

$$PDRB = -93.520.000.000 - 0.156 RUP + 25.210.000.000 RUTPAD + 4.747.000.000 RUPD - 53.961 DSR + 13.320.000.000 APB + 136.800.000.000 REB - 6.394 RBDTPDRB$$

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan hasil statistik menunjukkan nilai Adjusted R Square bahwa hanya 98,50 % rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Service Ratio*, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB dalam harga konstan sedangkan sisanya 0,50% dijelaskan oleh faktor lain yang seperti rasio ketergantungan keuangan daerah, analisis pertumbuhan utang, analisis realisasi pendapatan dan belanja dan rasio kinerja keuangan lainnya.

Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.998 ^a	.997	.985	2.18527E6	.997	87.103	7	2	.011

a. Predictors: (Constant), RBDPDRB, RUPD, RUTPAD, REB, DSR, APB, RUP

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: data diolah, 2017

B. Pembahasan

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan menentukan keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah guna mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode. Hal ini berimplikasi pada terpacunya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup komposisi APBD dari penerimaan yakni pendapatan, hutang dan alokasi pengeluaran. Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan rasio Hutang terhadap PDRB, Rasio Hutang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Service Ratio*, Rasio Hutang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pengeluaran, Rasio Efisiensi Pengeluaran, Rasio Pengeluaran Daerah atas PDRB telah mempengaruhi pusat pertumbuhan ekonomi atau PDRB (harga konstan) di Pemerintahan Kota Medan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki Pemerintah Kota Medan untuk pengeluaran daerah mampu menciptakan investasi di daerah tersebut. Sehingga pengaruh ini dapat meningkatkan pendapatan daerah itu dan memacu pertumbuhan ekonomi atau PDRB (harga konstan) di pemerintahan Kota Medan. Sementara itu, secara parsial bahwa Rasio Utang terhadap

PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Service Ratio*, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan), ini membuktikan bahwa secara otomatis utang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan tidak langsung merangsang peningkatan pendapatan daerah karena dalam menumbuhkan investasi atau pusat pertumbuhan itu melalui dengan memperbaiki infrastruktur pemerintah berupa belanja yang efeknya ke pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan Rasio Efisiensi Belanja berpengaruh positif sebesar 4.162 secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan) sehingga Pemerintah Kota Medan selama tahun 2006 sampai dengan 2015 telah benar-benar efisien dalam mengelola belanja untuk biaya pembangunan daerah nya atau jumlah dana yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah sudah optimal, sedangkan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB berpengaruh negatif sebesar - 4.436 secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan), masih adanya pembiayaan belanja daerah yang belum sesuai dengan perkembangan daerah tersebut menyebabkan pengaruh yang negatif dalam memperoleh pendapatan karena belanja daerah masih banyak menggunakan utang serta peningkatan belanja daerah tidak sesuai dengan bertambahnya pertumbuhan ekonomi sehingga untuk Pemerintah Kota Medan harus lebih optimal dan efektif lagi pengelolaan keuangan daerahnya dalam menghindari efek dari ketimpangan belanja dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun pemerintah daerah berhasil menggunakan dana hutang dengan membiaya pengeluaran daerah untuk melakukan investasi dalam meningkatkan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat serta kemampuan pemerintah daerah dengan bertanggung jawab dalam membayar hutangnya.

Disisi lain bahwa hutang digunakan dalam memperbaiki struktur neraca, meningkatkan struktur fiskal, menjaga kesinambungan fiskal serta untuk membiayai investasi pembangunan yang membutuhkan dana besar sehingga akselerasi pembangunan tercapai. Negara kita masih mengalami defisit APBN, dimana untuk menutupinya melalui pembiayaan dengan cara berhutang ke negara lain. Untuk pemerintah harus bekerja keras dalam mengelola investasi tersebut agar peningkatan pembiayaan yang bersumber dari hutang harus dibarengi dengan optimalisasi belanja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Tetapi pemerintah Kota Medan belum efisien peningkatan pendapatannya yang dibiayai dengan hutang sehingga belum ada hubungan yang optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Masih banyak investasi di Kota Medan belum dikelola dengan efektif dan efisien, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi karena ini berhubungan dengan aset Pemerintah Kota Medan yang mempengaruhi perkembangan pembangunan yang berkelanjutan menuju dan menghadapi masyarakat ASEAN.

BAB V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Hasil yang diperoleh secara simultan rasio Hutang terhadap PDRB, Rasio Hutang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Service Ratio*, Rasio Hutang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pengeluaran, Rasio Efisiensi Pengeluaran, Rasio Pengeluaran Daerah atas PDRB telah mempengaruhi pusat pertumbuhan ekonomi atau PDRB (harga konstan) di Pemerintahan Kota Medan. Sementara itu, secara parsial bahwa Rasio Utang terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Debt Service Ratio*, Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan). Sedangkan Rasio Efisiensi Belanja dan Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB dalam harga konstan).

B. Saran

Pemerintah Kota Medan lebih ekonomis, efisien dan efektif dalam mengelola keuangan daerah sehingga pembangunan daerah dapat tercapai. Selanjutnya dalam pemanfaatan Pengeluaran Daerah yang efektif berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang optimal dan seimbang dengan penggunaan hutang pada pemerintahan daerah masing-masing dapat berkontribusi positif pada pendapatan daerah. Bagi peneliti selanjutnya disarankan mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang memiliki PDRB tertinggi dan terendah pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tri Basuki dan Imamudin Y .2015. *Elektronik Data Prosesing (SPSS 15 dan Eviews 7)*. Danisa Media. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi ketiga, Yogyakarta: ANDI
- Ghozali, Imam. 2011. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS* 17 Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mahmudi. (2009). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah-Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mankiw. (2006). *Makro Ekonomi* :Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2007, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Marijana Badun. (2009). *Financial Intermediation By Banks And Economic Growth: A Review Of Empirical Evidence*. Institute of Public Finance, Zagreb.
- Magdalena Kludacz. (2012). *Financial dimension of measurement and assessment in the model of performance card for the hospitals. The College of Economics and Social Sciences in Plock. Warsaw University of Technology Plock, Poland.*
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sukirno, Sadono. (2008). *Teori Pengantar Makroekonomi*. PT. Raja Grafindo Perkasa: Jakarta
- Ulum, Iyahul. (2009). *Audit Sektor Publik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- www.medan.bps.go.id
- www.pemkomedan.go.id